

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Meningkatkan kapasitas Aparatur Kependudukan Tujuan : Meningkatkan kapasitas Aparatur Pelayanan Admininduk	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Tahun 2017 jumlah pegawai sebanyak 47 orang. 3. Tahun 2018 jumlah pegawai sebanyak 128 orang terdiri dari 51 orang pegawai Disdukcapil Painan dan 77 orang pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) 4. Tahun 2019 jumlah pegawai sebanyak 137 orang terdiri dari 47 orang pegawai di Disdukcapil Painan dan 90 orang di Unit Kerja Layanan (UKL) 5. Adanya penambahan pegawai baru di UKL sehingga mereka belum mengerti tentang penggunaan aplikasi SIAK	Akses: Operator dan Register Pegawai di UKL belum mahir menggunakan aplikasi SIAK Partisipasi : Operator dan Register membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami aplikasi SIAK. Kontrol : Operator dan register membutuhkan buku panduan aplikasi SIAK yang mudah untuk dipahami Manfat : Lambatnya layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.	1. Operator dan Register UKL Disdukcapil di 15 Kecamatan berasal dari Pegawai UPTD Dinas Pendidikan. 2. Keterbatasan kualitas kapasitas SDM Pelayanan Kependudukan	1. Masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda 2. Masyarakat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan walaupun persyaratan mereka kurang	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Admininduk	Mengadakan Bimbingan Teknis kepada Aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Tahun 2017 jumlah pegawai sebanyak 47 orang 3. Tahun 2018 jumlah ASN Dukcapil berjumlah 128 orang terdiri dari 51 orang pegawai Disdukcapil Painan dan 77 orang pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) 4. Tahun 2019 jumlah ASN Dukcapil berjumlah 137 orang terdiri dari 47 orang pegawai di Disdukcapil Painan dan 90 orang di Unit Kerja Layanan (UKL)	Input : Rp. 150.000.000 Output : 75 Pes sosialisasi administrasi kependudukan Outcome Meningkatnya kapasitas kemampuan pelayanan Administrasi Kependudukan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	6. Jumlah Penduduk tahun 2016 sebanyak 520.036 jiwa, tahun 2017 sebanyak 501.197 jiwa, tahun 2018 sebanyak 507.704 jiwa, 7. UKL Disdukcapil baru dibentuk dan beroperasi pada Juli 2018						5. Adanya penambahan pegawai baru di UKL sehingga mereka belum mengerti tentang penggunaan aplikasi SIAK 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Pada : tahun 2016 : 520.036 tahun 2017 : 501.197 tahun 2018: 507.704 7. UKL Disdukcapil baru dibentuk dan beroperasi pada Juli 2018	

Painan, 21 Juni 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si

Nip. 19670712 199202 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
KODE PROGRAM	1.02.06.1.02.06.01.15.17								
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Jumlah ASN Dukcapil tahun Tahun 2019 bertambah menjadi 137 orang, yang mana pada tahun 2017 berjumlah 47 orang dan tahun 2018 berjumlah 128 orang. c. Dibentuk Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil di 15 Kecamatan. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➤ Operator dan Register Pegawai di UKL belum mahir menggunakan aplikasi SIAK ➤ Operator dan Register membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami aplikasi SIAK. ➤ Operator dan register membutuhkan buku panduan aplikasi SIAK yang mudah untuk dipahami ➤ Lambatnya layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. b. Penyebab Internal ➤ Operator dan Register UKL Disdukcapil di 15 Kecamatan berasal dari Pegawai UPTD Dinas Pendidikan. ➤ Keterbatasan kualitas kapasitas SDM Pelayanan Kependudukan c. Penyebab Eksternal ➤ Masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda ➤ Masyarakat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan walaupun persyaratan mereka kurang								
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur ➤ Agar semua aparatur Kependudukan bisa melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik ➤ Dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh masyarakat. 2. Indikator dan Target Kinerja Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan : 75 orang								
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 6.746.242.914,00								
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	<table><tr><td>Masukan</td><td>Rp. 150.000.000,-</td></tr><tr><td>Keluaran</td><td>75 Peserta Sosialisasi Administrasi Kependudukan</td></tr><tr><td>Hasil</td><td>Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar 80%</td></tr></table>		Masukan	Rp. 150.000.000,-	Keluaran	75 Peserta Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Hasil	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar 80%
Masukan	Rp. 150.000.000,-								
Keluaran	75 Peserta Sosialisasi Administrasi Kependudukan								
Hasil	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar 80%								

Painan, 21 Juni 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M. Si
Nip. 19670712 199202 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Bijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peraturan Kegiatan 1 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan II : Penyediaan perlengkapan Rumah tangga Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Adminkuk kepada Masyarakat	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Dibutuhkan fasilitas Pelayanan : 1) 1 ruang tunggu pelayanan 2) 16 Ruang bermain anak 3) 16 Ruang Ibu Menyusui 4) 16 loket khusus disabilitas dan lansia. 5) 16 buah kursi roda	Akses: Masyarakat merasa tidak nyaman dalam mengurus dokumen kependudukan karena kurangnya fasilitas pelayanan untuk mereka. Partisipasi : Masyarakat enggan dalam kepengurusan adminkuk karena minimnya fasilitas pelayanan. Control : Dokumen perencanaan dalam peningkatan pelayanan telah ada tapi belum maksimal dilaksanakan Manfaat : Menurunnya IKM Pelayanan Adminkuk karena kurangnya fasilitas pelayanan.	Belum tertatanya ruang ruang gedung yang ada. Untuk menunjang pelayanan Adminkuk.	Masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan karena ruang pelayanan yang tidak responsive gender.	Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Adminkuk kepada Masyarakat	1. Melakukan renovasi gedung kantor dengan membuat ruang Ibu Menyusui, Taman Bermain Anak dan Loket Khusus Disabilitas, Orang Tua dan Ibu Hamil 2. Melakukan pengadaan alat bantu khusus untuk penyanggah disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dll 3. Membeli perlengkapan mainan anak – anak, ibu hamil dan menyusui.	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Dibutuhkan fasilitas Pelayanan : • 1 ruang tunggu pelayanan • 16 Ruang bermain anak • 16 Ruang Ibu Menyusui • 16 loket khusus disabilitas dan lansia. • 16 buah kursi roda	Kegiatan I : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Input : Rp. 150.000.000 Output : Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan Outcome : Terciptanya ruang pelayanan yang representative. Kegiatan II : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Adminkuk kepada Masyarakat Input : Rp. 200.000.000, Output : Tersedianya perlengkapan pelayanan umum : 1. 16 se perlengkapan bermain anak) 2. 16 unit kursi roda

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama ijakan/Program/K egiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	4. Masih minimnya fasilitas umum pelayanan seperti belum ada ruang/taman bermain anak, bagi masyarakat yang membawa anak dan ruang ibu menyusui 5. Belum tersedianya loket pelayanan khusus disabilitas orang tua dan ibu hamil						4. Masih minimnya fasilitas umum pelayanan seperti belum ada ruang/taman bermain anak, bagi masyarakat yang membawa anak dan ruang ibu menyusui 5. Belum tersedianya loket pelayanan khusus disabilitas orang tua dan ibu hamil	3. 16 set perlengkapan untuk ibu menyusui 4. 16 set perlengkapan disabilitas Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum.

Painan, 21 Juni 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN		
KODE PROGRAM	1.02.1.02.06.01.02		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan c. Belum ada ruang tunggu yang nyaman untuk masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan d. Masih minimnya fasilitas umum pelayanan seperti belum adanya ruang/taman bermain anak, bagi masyarakat yang membawa anak dan ruang ibu menyusui e. Belum tersedianya loket pelayanan khusus disabilitas, orang tua dan ibu hamil 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➤ Masyarakat merasa tidak nyaman dalam mengurus dokumen kependudukan karena kurangnya fasilitas pelayanan untuk mereka. ➤ Masyarakat enggan dalam kepengurusan adminduk karena minimnya fasilitas pelayanan. ➤ Dokumen perencanaan dalam peningkatan pelayanan telah ada tapi belum maksimal dilaksanakan ➤ Menurunnya IKM Pelayanan Adminduk karena kurangnya fasilitas pelayanan. b. Penyebab Internal ➤ Belum tertatanya ruang ruang gedung yang ada. Untuk menunjang pelayanan Adminduk c. Penyebab Eksternal ➤ Masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan karena ruang pelayanan yang tidak responsive gender		
CAPAIAN PROGRAM	3. Tolak Ukur a. Memberikan ruangan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Menyediakan ruang bermain bagi anak-anak yang ikut saat orang tuanya mengurus Dokumen Kependudukan dan ruang ibu menyusui ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Indikator dan Target Kinerja a. Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan b. Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 390.812..000,00		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Masukan	Rp 150.000.000,-
		Keluaran	Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan.
		Hasil	Terciptanya ruang pelayanan yang representative(75%)
	Kegiatan 2	Masukan	200.000.000,-
		Keluaran	1. Tersedianya 16 set perlengkapan bermain anak 2. 16 unit kursi roda 3. 16 set perlengkapan untuk ibu menyusui 4. 16 set perlengkapan disabilitas
		Hasil	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum(80%)



Painan, 21 Juni 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE M.Si
Nip. 19670712 199202 1 001